

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur ini akan merangkum temuan dari lima jurnal yang relevan dengan topik yang dibahas yaitu "Peran World Food Programme (WFP) dalam Menangani Ketahanan Pangan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19". Dengan menganalisis temuan dari kelima jurnal ini, tinjauan literatur ini akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang upaya dan tantangan dalam mencapai ketahanan pangan di Indonesia, serta rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan lebih lanjut.

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Upaya World Food Programme (WFP) Membantu Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia Melalui Country Strategic Plan (CSP) 2017-2020</i>	Tunduge Vergie Marcelino	Meneliti tentang program dari <i>World Food Programme (WFP)</i> yaitu <i>Country Strategic Plan (CSP)</i>	Penelitian ini tidak berfokus pada masalah ketahanan pangan Indonesia selama Covid, akan tetapi penelitian ini berfokus pada program <i>Country Strategic Plan (CSP)</i> pada periode 2017 hingga 2020,
2	Sektor Pertanian ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis	Fastabiqul Khairad	Meneliti tentang dampak yang diberikan dari pandemi Covid-19 terhadap sektor pertanian	Tidak membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan WFP untuk menanggulangi permasalahan ketahanan pangan pada saat Covid-19
3	<i>How Covid-19 Affects Food Security In Indonesia</i>	Mohammad Ikhsan dan I Gede Sthita Prajna Virananda	Meneliti tentang situasi ketahanan pangan di Indonesia dimasa pandemi Covid-19	Tidak membahas kerja sama Indonesia dalam program <i>Country Strategic Plan (CSP)</i> .
4	<i>Food Cold Chain in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: A Current Situation and Mitigation</i>	Ilyas Masudin dan Nika Tampi Safitri	Meneliti tentang penurunan daya beli komoditas rantai dingin dimasa pandemi Covid-19	Penelitian ini hanya fokus pada penurunan komoditas rantai makanan, Tidak membahas kerja sama Indonesia dalam program <i>Country Strategic Plan (CSP)</i> .

5	<i>Indonesian Food Security During The Covid-19 Pandemic</i>	Suwardi	Meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menangani ketahanan pangan di Indonesia	Tidak Secara Spesifik membahas upaya kerja sama Indonesia dalam program <i>Country Strategic Plan (CSP)</i> .
---	--	---------	---	---

Literatur pertama yang berjudul *Upaya World Food Programme (WFP) Membantu Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia Melalui Country Strategic Plan (CSP) 2017-2020*. Dengan penulis bernama Tunduge Vergie Marcelino dari e-Journal Hubungan Internasional volume 9 nomor 4 tahun 2022. Literatur ini menjelaskan tentang program *Country Strategic Plan (CSP)* tahun 2017-2020 sebagai bentuk mengurangi kelaparan di Indonesia. Hasil daripada literatur ini menerangkan bahwa program CSP ini telah mencapai target pengurangan angka kelaparan di Indonesia. Namun, pada saat pandemi Covid-19 atau di tahun 2020 program ini mengalami hambatan dikarenakan sistem ketahanan pangan dan gizi di Indonesia mengalami perubahan gaya hidup masyarakat dan daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan gagalnya pemerintah Indonesia dalam mengelola ekonomi dimasa pandemi Covid-19 (Marcelino, 2022). Terdapat pula persamaan daripada literatur ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti program dari *World Food Programme (WFP)* yaitu *Country Strategic Plan (CSP)*. Selain itu, terdapat pula perbedaan literatur ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada bagaimana implementasi program *Country Strategic Plan (CSP)* tahun 2017-2020 di Indonesia dan tidak secara spesifik membahas implementasi CSP pada saat pandemic Covid-19.

Literatur kedua yang berjudul *Sektor Pertanian ditengah Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis*. Dengan penulis bernama Fastabiqul Khairad dari Jurnal Agriuma volume 2 nomor 2. Literatur ini menjelaskan tentang bagaimana

dampak pandemi Covid-19 terhadap kegiatan subsistem agribisnis, baik dari segi produksi hingga ke tangan para konsumen. Pada masa pandemi Covid-19, produksi pertanian menurun hingga 5% dikarenakan harga produksi tani meningkat, mulai dari benih, pupuk, pestisida dan pakan serta distribusi yang dinilai tidak lancar. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan PSBB yang dilakukan pemerintah guna mengurangi penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia (Khairad, 2020). Terdapat pula persamaan daripada literatur ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu mengenai dampak yang diberikan dari pandemi Covid-19 terhadap sektor pertanian. Selain itu terdapat pula perbedaan literatur ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada terganggunya sektor produksi dan kenaikan harga jual produksi pertanian dimasa pandemi Covid-19 dan tidak membahas mengenai kerja sama Indonesia dengan WFP untuk menanggulangi permasalahan ketahanan pangan pada saat Covid-19.

Literatur ketiga yang berjudul *How Covid-19 Affects Food Security In Indonesia*. Dengan penulis bernama Mohammad Ikhsan dan I Gede Sthita Prajna Virananda dari ISSN 2356-4008. Literatur ini menjelaskan tentang bagaimana situasi ketahanan pangan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 yang dimana ketahanan pangan terancam oleh guncangan pendapatan dan daya beli pangan masyarakat Indonesia. Hal tersebut juga diperkuat pada masa Idul Fitri 2021 yang dimana adanya varian baru delta pandemi Covid-19, sehingga pemerintah menjalankan kembali PSBB. Oleh karena itu, masyarakat kembali mengalami guncangan pendapatan dan tentunya mengalami daya beli pangan (Mohammad Ikhsan, 2021). Terdapat pula persamaan daripada literatur ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti mengenai situasi ketahanan pangan di Indonesia

dimasa pandemi Covid-19. Selain itu terdapat pula perbedaan literatur ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu penelitian tersebut meneliti dari sisi permintaan maupun penawaran yang berhubungan dengan kemampuan rumah tangga dalam membeli pangan dan Tidak membahas kerja sama Indonesia dalam program *Country Strategic Plan (CSP)*.

Literatur keempat yang berjudul *Food Cold Chain in Indonesia During the Covid-19 Pandemic: A Current Situation and mitigation*. Dengan penulis bernama Ilyas Masudin dan Nika Tampi Safitri dari Jurnal Rekayasa Sistem Industri volume 9 nomor 2. Literatur ini menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap proses bisnis pangan rantai dingin di Indonesia yang belum banyak terbayar dengan mempertimbangkan beberapa isu terkini seperti isu *supply and demand*, keamanan pangan dan tantangan serta mitigasi transportasi pangan (Ilyas Masudin, 2020). Terdapat pula persamaan daripada literatur ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti mengenai penurunan daya beli komoditas rantai dingin dimasa pandemi Covid-19. Selain itu terdapat pula perbedaan literatur ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu Penelitian ini hanya fokus pada penurunan komoditas rantai makanan, Tidak membahas kerja sama Indonesia dalam program *Country Strategic Plan (CSP)*..

Literatur kelima yang berjudul *Indonesian Food Security During The Covid-19 Pandemic*. Dengan penulis bernama Suwardi dari Jurnal *Earth and Environmental Science*. Literatur ini menjelaskan tentang bagaimana masyarakat dan pemerintah Indonesia mempertahankan ketahanan pangan. Hal tersebut dapat dilihat dari inovasi pangan yang dilakukan masyarakat seperti mengembangkan dan mengolah sagu untuk bahan pangan dan industry yang banyak ditemukan di Papua,

Maluku dan Sumatera. Banyak webinar dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diadakan khusus membahas sagu. Pemerintah daerah penghasil sagu juga menyambut baik untuk lebih memberdayakan sumber pangan lokal ini. Selain pada masyarakat, tentu pemerintah juga melakukan upaya yang berfokus pada mempertahankan pangan. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang memberikan bantuan relasi kredit kepada petani. Selain itu, pemerintah memperkenalkan teknologi kepada petani untuk membantu para petani dalam mendistribusikan dan menjaga stabilitas harga produk pangan di masa pandemic Covid-19 (Suwardi, 2021).

Terdapat pula persamaan daripada literatur ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menangani ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu terdapat pula perbedaan literatur ini dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tidak secara spesifik membahas upaya kerja sama Indonesia dalam program *Country Strategic Plan* (CSP).

Dengan melihat literatur yang ada maka penelitian ini memunculkan novelty dari pada penelitian lain yaitu belum ada yang membahas kerja sama Indonesia dan WFP melalui program *Country Strategic Plan* (CSP) pada masa Pandemi Covid-19

2.2. Kerangka Teoritis/Konseptual

Untuk mempermudah serta memperkuat teori dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi internasional yang dipadupadankan dengan konsep *Global Governance* dan konsep *Food Security*. Penggunaan teori dan konsep ini tentunya bertujuan sebagai kerangka dasar teori serta konsep yang menjadi tumpuan penelitian untuk dapat menjawab permasalahan secara teoritis.

2.2.1. Teori Organisasi Internasional

Menurut K.J Holsti, organisasi internasional merupakan badan internasional yang dibangun dengan perjanjian beberapa negara untuk tujuan bersama yang bertujuan khusus dengan cara yang terorganisir. Organisasi internasional harus memiliki tujuan bersama yang terdiri dari negara-negara yang mempunyai visi yang sama dan tentunya bersedia untuk melakukan perjanjian. Peran daripada organisasi internasional di dunia salah satunya yaitu sebagai aktor dalam instrumen kerjasama, baik yang dilakukan antar organisasi internasional ataupun antar negara dan organisasi internasional dengan tujuan untuk mencapai cita-cita bersama (Holsti, 1982).

Teori organisasi internasional berfokus pada asumsi, rangkaian konsep dan pendekatan yang dipakai untuk menganalisis dan memahami organisasi internasional. Tujuan dari organisasi internasional sendiri dapat bermacam-macam, seperti menangani permasalahan keamanan, masalah iklim, meningkatkan ekonomi, dll. Sebagaimana tujuan dibentuknya organisasi internasional yaitu untuk melindungi Hak Asasi Manusia.

Organisasi internasional dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tujuan, keanggotaan, struktur, dan aktivitas yang dilakukannya. Pertama, dari segi tujuan, organisasi internasional dapat dibedakan berdasarkan fokus mereka, seperti organisasi politik yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional seperti PBB, organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara seperti WTO, atau organisasi kemanusiaan yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam situasi krisis seperti Palang Merah Internasional. Kedua, keanggotaan merupakan kriteria penting dalam mengelompokkan organisasi internasional, di mana beberapa organisasi memiliki

keanggotaan yang terbuka untuk semua negara, sementara yang lain memiliki keanggotaan terbatas atau terdiri dari negara-negara dengan kepentingan serupa.

Selanjutnya, struktur organisasi juga menjadi faktor penting dalam mengelompokkan organisasi internasional. Beberapa organisasi memiliki struktur yang lebih terpusat, di mana keputusan dibuat oleh badan tertinggi yang mewakili semua anggota, seperti Dewan Keamanan PBB. Di sisi lain, ada juga organisasi dengan struktur yang lebih terdesentralisasi, di mana keputusan dibuat oleh kesepakatan bersama antara anggota atau oleh badan-badan eksekutif yang memiliki otonomi yang lebih besar, seperti Uni Eropa (Studocu, 2022).

Intergovernmental Organization (IGO) dapat dikelompokkan kepada 4 jenis, menurut keanggotaan dan tujuannya:

- a. Organisasi yang tujuan atau sifat dari keanggotaannya umum. Organisasi ini mempunyai cakupan global dan menjalankan berbagai fungsi seperti, sosial dan ekonomi, keamanan, perlindungan Hak Asasi Manusia, pertukaran kebudayaan, dll. Seperti contoh PBB, dll
- b. Organisasi fungsional memiliki keanggotaan yang terbuka untuk umum, tetapi fokusnya hanya pada satu fungsi tertentu, seperti *World Health Organization* (WHO), *United Nations on AIDS* (UNAIDS), *United Nations High Commisioner on Refugees* (UNHCR), dll.
- c. Organisasi yang keanggotaannya terbatas, namun tujuannya umum. Organisasi sejenis ini biasanya adalah organisasi yang bersifat regional yang fungsi dan tanggungjawab keamanan, politik, sosial dan ekonominya berskala luas. Seperti contoh ASEAN, Uni Eropa, dll.

- d. Organisasi yang anggota serta tujuannya terbatas. Organisasi ini terbagi berdasarkan sosial dan ekonomi. Seperti contoh *Latin American Free Trade Association* (LAFTA), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), dll (Studocu, 2022).

World Food Programme (WFP) merupakan IGO yang tentunya teori organisasi internasional akan lebih efisien digunakan untuk membahas bagaimana WFP melanjutkan program *Country Strategic Plan* (CSP) di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Hal tersebut dapat ditinjau dari adanya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan WFP untuk menangani permasalahan ketahanan pangan di Indonesia pada saat pandemi Covid-19.

2.2.2. Konsep *Global Governance*

Ide tentang *global governance* hadir sebagai akibat dan berkaitan terhadap fenomena globalisasi ekonomi (Jeffrey A. Hart, 1999). *Global governance* diartikan sebagai sebuah ide normatif yaitu sebagai sebuah ide yang diunggulkan ataupun yang akan diwujudkan. Menurut Rosenau dan Czempiel (2000), *governance* dapat bekerja dalam keadaan yang legitimasinya lemah. *Governance* bekerja ketika mayoritas menerima keberadaannya. Adapula kategori aktor yang umumnya berpartisipasi terhadap *global governance* menurut Renaud Francois (2009) diantaranya yaitu pemerintah, *Inter-governmental Organization* (IGO), perwakilan masyarakat madani (*Civil Society Representative*), pelaku ekonomi dan keuangan internasional (*Economic and Finance Actors*), negara dan kelompok-kelompok informal (Sugiono, 2004).

Konsep *global governance* merujuk pada sistem pengaturan dan pengelolaan urusan dunia secara bersama-sama oleh berbagai aktor di tingkat global. Konsep ini

menyoroti perlunya kerjasama antara negara-negara dan aktor non-negara dalam mengatasi tantangan-tantangan global yang kompleks, seperti perdamaian dan keamanan internasional, perdagangan internasional, lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Konsep ini menekankan bahwa dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, tidak ada negara yang dapat mengatasi masalah global secara mandiri, dan oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih erat.

Salah satu aspek penting dari konsep global governance adalah kerjasama lintas-batas antara berbagai aktor, termasuk negara-negara, organisasi internasional, perusahaan multinasional, LSM, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini terwujud dalam bentuk perjanjian, konvensi, forum-forum internasional, dan lembaga-lembaga global yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Global governance juga menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, keberlanjutan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan global. Hal ini menandakan bahwa dalam sistem global yang demokratis, semua negara dan aktor memiliki suara yang setara dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi kepentingan bersama. Konsep ini juga memperhatikan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan dalam mendistribusikan manfaat dari integrasi global.

Namun, konsep global governance juga menghadapi sejumlah tantangan dan kritik. Salah satunya adalah kurangnya konsensus dan kepatuhan terhadap hukum internasional, yang seringkali menyebabkan ketidakmampuan untuk menangani masalah global dengan efektif. Selain itu, terdapat ketidaksetaraan dalam kekuasaan

dan akses terhadap sumber daya di tingkat global, yang dapat menghambat kerjasama internasional yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks era digital dan teknologi informasi, konsep global governance juga menghadapi tantangan baru terkait regulasi dan perlindungan data, keamanan siber, dan pengaturan keuangan global. Kemajuan teknologi telah mengubah lanskap politik dan ekonomi global dengan cepat, sehingga membutuhkan respons dan mekanisme pengaturan yang sesuai (Sugiono, 2004).

Dengan adanya kerjasama *World Food Programme* (WFP) dengan lembaga pemerintahan dan juga lembaga swasta, maka konsep *global governance* menjadi lebih efisien dalam melihat bagaimana adanya kerjasama yang terjadi untuk melanjutkan program *Country Strategic Plan* (CSP) dimana adanya keterlibatan lembaga pemerintah dan juga lembaga swasta untuk menangani permasalahan ketahanan pangan di Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

2.2.3. Konsep *Food Security*

Ketahanan pangan menurut Maxwell dan Frankenberger yaitu terjaganya akses pada setiap saatnya untuk pangan yang cukup. Istilah tersebut yaitu menjamin, akses, waktu dan cukup, yang dimana di definisikan secara khusus dan dapat bervariasi. Ketahanan pangan memiliki definisi baru yang lebih luas daripada hanya memiliki cukup makanan untuk bertahan hidup. Definisi baru ini menekankan pada kemampuan untuk mengakses dan mengonsumsi makanan yang bergizi dan aman untuk mendukung gaya hidup yang aktif dan sehat (Simon Maxwell, 1992). Marzeda Mlynarska membagi ketahanan pangan menjadi empat pilar utama:

- a. Ketersediaan pangan fisik: Adanya cukup makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada masyarakat.
- b. Akses ekonomi dan sosial: Kemampuan masyarakat untuk membeli dan mendapatkan makanan yang bergizi. Hal ini terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan stabilitas harga pangan.
- c. Stabilitas akses: Kemampuan masyarakat untuk mendapatkan makanan secara konsisten dan berkelanjutan, bahkan di saat terjadi krisis atau bencana.
- d. Pemaksimalan konsumsi pangan: Kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan makanan yang tersedia secara optimal untuk mencapai kesehatan dan gizi yang optimal (Mlynarska, 2017).

Food security merupakan konsep yang meliputi ketersediaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan pangan bagi seluruh populasi. Ancaman terhadap food security dapat berasal dari berbagai penyebab yang mempengaruhi produksi, distribusi, dan akses terhadap pangan. Salah satu ancaman yang seringkali muncul adalah ketidakstabilan iklim. Perubahan iklim dapat mengakibatkan cuaca ekstrem seperti kekeringan, banjir, dan musim hujan yang tidak teratur, yang mengganggu produksi pertanian dan menurunkan ketersediaan pangan. Kekeringan misalnya, dapat mengurangi produktivitas tanaman dan mengakibatkan gagal panen, sementara banjir dapat merusak tanaman dan infrastruktur pertanian (Singer, 2005).

Selain itu, bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan badai tropis juga merupakan ancaman serius terhadap food security. Bencana alam ini dapat merusak lahan pertanian, menghancurkan infrastruktur penyimpanan pangan, dan mengganggu rantai pasokan pangan. Dampaknya dapat berdampak pada ketersediaan pangan dan menyebabkan kelaparan di wilayah yang terkena

dampak. Kerentanan terhadap bencana alam dapat diperparah oleh kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah rawan bencana (Singer, 2005).

Selain faktor alam, masalah ekonomi juga dapat menjadi ancaman terhadap food security. Ketidakstabilan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat mengakibatkan kesulitan dalam membeli pangan yang cukup dan berkualitas bagi sebagian masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tingkat kelaparan dan malnutrisi, terutama di kalangan keluarga dengan pendapatan rendah.

Selain itu, konflik dan kekerasan juga dapat menjadi ancaman terhadap food security. Konflik bersenjata, perang saudara, dan ketegangan politik dapat mengganggu produksi pangan, membatasi akses terhadap sumber daya pangan, dan menghalangi distribusi pangan ke wilayah yang terkena dampak. Dampaknya dapat berdampak pada peningkatan tingkat kelaparan, malnutrisi, dan krisis kemanusiaan.

Upaya-upaya untuk mengatasi ancaman terhadap food security perlu dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan pangan meliputi pengembangan pertanian berkelanjutan, diversifikasi sumber daya pangan, peningkatan infrastruktur pertanian, dan pembangunan kapasitas masyarakat. Selain itu, diperlukan juga kebijakan publik yang mendukung aksesibilitas pangan bagi semua lapisan masyarakat, perlindungan terhadap petani kecil dan rentan, serta peningkatan ketersediaan pangan melalui sistem distribusi yang efisien dan adil.

Kemitraan antara pemerintah, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan sektor swasta juga penting dalam mengatasi ancaman alam terhadap ketahanan

pangan. Dengan berkolaborasi dalam pengembangan teknologi, penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan, dan penyediaan bantuan darurat, pihak-pihak ini dapat membantu meningkatkan resiliensi sistem pangan terhadap ancaman alam. Selain itu, edukasi dan kapasitas peningkatan juga merupakan faktor penting dalam mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi ancaman alam, dengan menyediakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola risiko dan merespons bencana dengan efektif.

Dalam konteks global, kerjasama internasional juga diperlukan untuk mengatasi ancaman alam terhadap ketahanan pangan. Organisasi internasional seperti PBB dan organisasi regional dapat memainkan peran penting dalam menyediakan bantuan darurat, mendukung upaya adaptasi, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar negara. Melalui kerjasama lintas-batas dan koordinasi yang efektif, negara-negara dapat bekerja bersama untuk mengurangi kerentanan terhadap ancaman alam dan memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi semua (Death, 2011).

Terkait penjelasan konsep ketahanan pangan diatas, konsep ketahanan pangan lebih efisien digunakan untuk mengetahui kondisi pangan di Indonesia pada masa sebelum pandemi Covid-19 ataupun pada masa pandemi Covid-19. Karena pada konsep ketahanan pangan kita dapat mengkaji lebih dalam mengenai kondisi ketahanan pangan setelah adanya bantuan dari World Food Programme (WFP) melalui program Country Strategic Plan (CSP).

2.3. Asumsi Penelitian

Dengan menggabungkan teori organisasi internasional serta konsep *Global Governance* dan konsep *Food Security*, maka penelitian ini berasumsi bahwa **dengan adanya kerjasama Indonesia dan *World Food Programme (WFP)* melalui program *Country Strategic Plan (CSP)* berupa Program Sekolah Ramah Pangan, Program Pertanian Berkelanjutan, dan Peningkatan Produktivitas Pertanian, maka Indonesia dapat mengatasi masalah kerawanan pangan pada masa pandemi covid di Indonesia.**

2.4. Kerangka Analisis

